

Girsang, T. S., Merina, B., Astuti, P., Wahyudi, S., Suljarmiko (2026). Tata Kelola Kolaboratif dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Air Terjun Sipiso-Piso. *Prediksi*. Vol. 25 (2) 415-428.

## Tata Kelola Kolaboratif dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Air Terjun Sipiso-Piso

Tri Sandhya Girsang<sup>1\*</sup>, Bresca Merina<sup>2</sup>, Pudji Astuti<sup>3</sup>, Sigit Wahyudi<sup>4</sup>, Suljarmiko<sup>5</sup>

<sup>1,3,4,5</sup> Universitas Waskita Dharma Malang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[trisandhya.girsang@gmail.com](mailto:trisandhya.girsang@gmail.com), <sup>2</sup>[brescamerina1@gmail.com](mailto:brescamerina1@gmail.com), <sup>3</sup>[dra.puji@gmail.com](mailto:dra.puji@gmail.com), <sup>4</sup>[wahyudidr123@gmail.com](mailto:wahyudidr123@gmail.com), <sup>5</sup>[suljarmikoo775@gmail.com](mailto:suljarmikoo775@gmail.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Received:

30 Mei 2026

Received in revised form:

29 Juni 2026

Accepted:

23 Juli 2026

#### Keyword:

collaborative governance; community empowerment; eco-tourism; Sipiso-piso Waterfall; sustainable tourism

#### Kata Kunci:

tata kelola kolaboratif; pemberdayaan masyarakat; ekowisata; Air Terjun Sipiso-piso; pariwisata berkelanjutan

### ABSTRACT

*This study aims to analyze collaborative governance and community empowerment in the management of sustainable eco-tourism at the Sipiso-piso Waterfall, Karo Regency, North Sumatra. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving local government officials, tourism managers, local communities, MSME actors, and tourism community groups. The findings indicate that tourism management at Sipiso-piso Waterfall has involved multiple stakeholders; however, collaborative governance has not yet been implemented in a structured and sustainable manner. Coordination among actors remains fragmented, and decision-making processes are largely dominated by the government. In terms of community empowerment, local communities have gained economic benefits from tourism activities, but these benefits are still limited to basic economic participation and lack adequate capacity building and continuous assistance. The study also identifies concrete needs for improving supporting infrastructure, including the construction of a bridge to access the lower area of the waterfall, children's playgrounds, seating facilities, and gazebos. These findings emphasize the importance of strengthening collaborative governance and community empowerment to achieve inclusive and sustainable eco-tourism management.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Air Terjun Sipiso-piso, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat lokal, pelaku UMKM, serta kelompok komunitas pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata di Air Terjun Sipiso-piso telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, namun tata kelola kolaboratif belum terlaksana secara terstruktur dan berkelanjutan. Koordinasi antaraktor masih bersifat parsial, dan proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, masyarakat lokal telah memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata, tetapi manfaat tersebut masih terbatas pada partisipasi ekonomi dasar dan belum disertai dengan penguatan kapasitas maupun pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan konkret terkait peningkatan infrastruktur pendukung, seperti pembangunan jembatan menuju area bawah air terjun, taman bermain anak, fasilitas tempat duduk, serta gazebo. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan ekowisata yang inklusif dan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

\* Corresponding author: [trisandhya.girsang@gmail.com](mailto:trisandhya.girsang@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pengembangan pariwisata berkelanjutan telah menjadi agenda strategis dalam kebijakan pembangunan daerah di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki potensi wisata alam yang signifikan. Salah satu pendekatan yang paling menonjol adalah ekowisata, yang secara spesifik berfokus pada pengelolaan kawasan berbasis alam dengan memperhatikan aspek konservasi dan partisipasi masyarakat lokal. Ekowisata secara luas dipandang sebagai pendekatan yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat secara bersamaan (Hamka dkk., 2022; Malik, 2018). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan destinasi ekowisata sering kali lebih memprioritaskan hasil ekonomi, sementara aspek tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat masih belum diterapkan secara optimal. Dowling (2007) menemukan adanya kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan inisiatif ekowisata. Demikian pula, Saufi et al. (2014) menekankan terbatasnya partisipasi masyarakat lokal dalam proyek-proyek ekowisata. Ketidadaan perencanaan yang matang dan teknik pengelolaan yang efektif masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan.

Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian dalam kajian akademik maupun kebijakan publik semakin mengarah pada pentingnya penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sektor publik, termasuk di bidang pariwisata. Tata kelola kolaboratif menyoroti keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan masyarakat sipil) dalam perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan, serta implementasi melalui proses bersama yang setara (Andhika dkk., 2025; Bramwell & Lane, 2011). Pendekatan kolaboratif merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan karena mampu meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat legitimasi, serta mengurangi konflik kepentingan antar aktor (Ansell & Gash, 2008). Selain itu, keberhasilan ekowisata juga sangat berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat lokal (Irmawati & Hasnawati, 2024). Pemberdayaan tidak hanya mencakup partisipasi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga pembangunan kapasitas, peningkatan kemandirian, dan control yang lebih besar terhadap sumber daya yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian terkini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program pembangunan, meskipun tantangan masih tetap ada, terutama dalam keterbatasan modal, kapasitas, dan akses pasar (Merina dkk., 2023). Indonesia dikenal memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat, di mana pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai lokal dan struktur sosial yang telah ada (Situmorang dkk., 2025). Penelitian mengenai kearifan lokal dan hukum adat menunjukkan bahwa inisiatif pembangunan yang mengabaikan konteks sosial budaya dapat menyebabkan distribusi manfaat yang tidak merata serta melemahkan partisipasi Masyarakat (Merina & Muhaimin, 2023; Muda, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya, termasuk pengembangan pariwisata, harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang peka terhadap kondisi lokal. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis alam atau ekowisata, di mana keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kelestarian lingkungan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai pemilik ruang hidup dan budaya.

Kawasan Air Terjun Sipiso-piso yang terletak di wilayah Kabupaten Karo, Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi wisata berbasis alam yang menonjol di Sumatera Utara dengan karakteristik lanskap yang unik dan daya tarik visual yang kuat. Air terjun ini dikenal sebagai

salah satu air terjun tertinggi di Indonesia dengan ketinggian sekitar 120 meter, yang mengalir dari tebing curam menuju kawasan perbukitan di sekitar Danau Toba. Keberadaannya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga nilai ekologis yang tinggi karena berada dalam kawasan yang masih relatif alami dan menjadi bagian dari sistem ekosistem pegunungan serta kawasan penyangga Danau Toba (Laysen & Effendy, 2024; Purwoko dkk., 2025). Selain itu, posisinya yang strategis sebagai salah satu pintu masuk menuju kawasan Danau Toba menjadikan Air Terjun Sipiso-piso memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan pariwisata regional, khususnya dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan destinasi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan praktik pengelolaan yang optimal. Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pengelolaan destinasi ini, di antaranya lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan yang terlibat, seperti pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih cenderung terbatas, sehingga mereka lebih banyak berperan sebagai pelaku ekonomi daripada sebagai aktor strategis dalam tata kelola pariwisata. Di sisi lain, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti aksesibilitas, sarana kebersihan, dan layanan wisata, juga belum sepenuhnya memadai untuk menunjang pengalaman wisata yang berkualitas (Laysen & Effendy, 2024; Situmorang dkk., 2025).



Gambar 1. Air Terjun Sipiso-piso

*Sumber: Dokumentasi Pribadi*

Sejalan dengan kondisi tersebut, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan wisata dengan fokus pada bentuk dan tingkat partisipasi. Mulyani dkk. (2021) menemukan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan salah satu syarat penting dalam pariwisata berkelanjutan; namun, masyarakat lokal hanya diposisikan sebagai pelaku ekonomi, bukan sebagai aktor strategis dalam proses pengambilan keputusan lintas pemangku kepentingan. Sitanggang & Sugiarti (2020) menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata berbeda-beda pada setiap tahapan pengelolaan. Pada tahap perencanaan, partisipasi dikategorikan sebagai partisipasi terinduksi; pada tahap pengorganisasian dan penggerakan, masyarakat berpartisipasi secara spontan; sedangkan pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat partisipasi terinduksi. Edyanto dkk. (2026) juga menemukan bahwa pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal memiliki potensi yang kuat, tetapi belum diimbangi dengan tata kelola yang efektif. Penelitian-penelitian tersebut belum mengeksplorasi mekanisme tata kelola yang memfasilitasi kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat lokal diterapkan dalam pengelolaan ekowisata Air Terjun Sipiso-piso. Hal ini penting untuk menjawab keterbatasan integrasi tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. Dengan mengkaji interaksi antara tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat lokal, penelitian ini menawarkan perspektif berbasis tata kelola untuk memahami pengelolaan ekowisata berkelanjutan di destinasi wisata. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan serta memberikan rekomendasi bagi tata kelola ekowisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola pariwisata berkelanjutan melalui integrasi konsep tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pengelola wisata, masyarakat lokal, dan para pemangku kepentingan pariwisata mengenai pentingnya tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan destinasi ekowisata.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai tata kelola kolaboratif dan proses pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan ekowisata berkelanjutan. Metode studi kasus memungkinkan eksplorasi yang kontekstual dan komprehensif terhadap praktik pengelolaan ekowisata pada suatu lokasi tertentu, yaitu kawasan wisata Air Terjun Sipiso-piso di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Creswell & Poth, 2018). Lokasi penelitian dipilih karena memiliki potensi wisata alam yang signifikan serta peran strategis dalam mendukung pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba. Selain itu, kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, perbedaan kepentingan, keterlibatan masyarakat lokal yang masih terbatas dalam proses pengambilan keputusan, serta kurang memadainya fasilitas pendukung pariwisata. Kondisi tersebut menjadikan kawasan ini relevan untuk dianalisis dari perspektif tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat.

Responden penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan peran mereka dalam pengelolaan kawasan wisata. Teknik pengambilan sampel ini dinilai tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dari aktor-aktor kunci yang memiliki pemahaman komprehensif terhadap fenomena penelitian (Etikan dkk., 2016). Sebanyak 12 informan terlibat dalam penelitian ini, yang terdiri atas tiga perwakilan pemerintah, dua pengelola wisata sebagai aktor non-pemerintah, dua masyarakat lokal, empat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta satu wisatawan. Tiga informan dari unsur pemerintah merupakan perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan, koordinasi, dan pengembangan pariwisata. Sementara itu, dua informan dari unsur non-pemerintah merupakan pengelola wisata Air Terjun Sipiso-piso yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan dan pengelolaan aktivitas kepariwisataan di kawasan tersebut. Pemilihan kedua kelompok informan tersebut dilakukan untuk memperoleh perspektif dari aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam proses tata kelola dan pengembangan kawasan wisata. Sedangkan, dua masyarakat lokal dipilih dari warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata dan memiliki pengetahuan serta keterlibatan dalam aktivitas kepariwisataan.

Empat informan pelaku UMKM juga dipilih secara *purposive* dengan kriteria pemilihan meliputi a) pelaku usaha merupakan masyarakat lokal, b) menjalankan usaha di dalam atau sekitar kawasan wisata, c) telah menjalankan usaha selama 6-12 bulan, serta d) memiliki

pengalaman memperoleh manfaat atau menghadapi kendala dari perkembangan pariwisata Air Terjun Sipiso-piso. Sementara itu, satu informan wisatawan dipilih dari pengunjung yang sedang melakukan kunjungan ke Air Terjun Sipiso-piso. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi rinci mengenai kolaborasi antar pemangku kepentingan, proses pengambilan keputusan, serta sejauh mana pemberdayaan masyarakat lokal dilaksanakan. Observasi memungkinkan peneliti mengamati secara langsung kondisi fisik kawasan wisata, aktivitas kepariwisataan, serta interaksi antar aktor di lapangan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi dokumen kebijakan, laporan resmi, dan arsip terkait pengelolaan kawasan wisata (Yin, 2017).

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang telah disederhanakan kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan melalui identifikasi pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data lapangan (Miles dkk., 2020). Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data sehingga meningkatkan kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian (Creswell & Poth, 2018). Penelitian ini menggunakan dua kerangka analisis utama, yaitu teori *collaborative governance* dan teori pemberdayaan masyarakat. *Collaborative governance* dianalisis menggunakan dimensi utama yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), meliputi partisipasi pemangku kepentingan secara inklusif, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pengambilan keputusan bersama, serta mekanisme kolaborasi yang terinstitusionalisasi. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dianalisis berdasarkan perspektif Friedmann (1992), yang berfokus pada akses terhadap sumber daya, penguatan kapasitas, kemandirian, dan keberlanjutan manfaat ekonomi. Kedua kerangka tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menginterpretasikan temuan empiris dan menilai sejauh mana pengelolaan ekowisata di Air Terjun Sipiso-piso telah sejalan dengan prinsip tata kelola yang berkelanjutan dan inklusif.

## HASIL PENELITIAN

Pengelolaan kawasan wisata Air Terjun Sipiso-piso melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat lokal, serta pelaku usaha di sekitar kawasan. Namun, keterlibatan para pihak tersebut belum terinstitusionalisasi dalam suatu kerangka kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan. Koordinasi antar pemangku kepentingan masih bersifat terfragmentasi dan sebagian besar didorong oleh kebutuhan jangka pendek atau situasional. Beberapa informan menyampaikan bahwa belum terdapat forum formal yang secara konsisten memfasilitasi dialog antar pihak dalam proses perencanaan maupun evaluasi pengelolaan pariwisata. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan evaluasi secara berkala, mekanisme tersebut belum mampu menjamin koordinasi yang efektif maupun pengambilan keputusan yang inklusif. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa komunikasi antar pemangku kepentingan cenderung bersifat administratif dibandingkan partisipatif.



Gambar 2. Wawancara bersama informan (masyarakat lokal, pelaku UMKM, dan staf pariwisata)

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Salah satu informan menegaskan bahwa masukan dari masyarakat sering kali tidak ditindaklanjuti secara konkret, "Ketika pemerintah daerah diberikan masukan, mereka hanya menyetujui saja, tetapi tidak ada implementasi, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk terus memberikan masukan." (Wawancara dengan pelaku UMKM). Kondisi ini melemahkan kepercayaan dan mengurangi partisipasi aktif masyarakat lokal. Akibatnya, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh aktor pemerintah, sementara masyarakat lebih ditempatkan sebagai pelaksana dibandingkan sebagai mitra strategis.

Selain itu, kolaborasi dengan aktor eksternal, khususnya sektor swasta, juga belum berkembang secara optimal. Beberapa rencana pengembangan masih terkendala keterbatasan anggaran dan belum adanya kolaborasi lintas sektor. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, "Kolaborasi antara pihak swasta dan pemerintah daerah akan sangat membantu, karena masih banyak aspek di kawasan wisata ini yang perlu diperbaiki." (Wawancara dengan pengelola wisata). Di samping itu, rencana pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan fasilitas akses menuju area bawah air terjun, memerlukan dukungan pemangku kepentingan yang lebih luas, "Sudah ada rencana pembangunan lift menuju area bawah, tetapi hal tersebut membutuhkan kolaborasi dan dukungan." (Wawancara dengan aparatur pemerintah daerah). Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi antar pemangku kepentingan masih terbatas dan belum berkembang menjadi sistem *collaborative governance* yang stabil dan terinstitusionalisasi. Tidak adanya forum rutin dan formal yang mempertemukan pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal semakin memperkuat kondisi tersebut. Akibatnya, pengambilan keputusan masih didominasi oleh pemerintah, sedangkan masyarakat sering kali hanya terlibat dalam peran operasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama *collaborative governance*, seperti dialog inklusif, pengambilan keputusan bersama, dan distribusi peran yang setara, belum terlaksana secara efektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di kawasan wisata Air Terjun Sipiso-piso lebih banyak diwujudkan melalui aktivitas ekonomi. Masyarakat lokal terlibat dalam berbagai kegiatan terkait pariwisata, seperti mengelola kios, menjual produk lokal, mengatur area parkir, dan menyediakan layanan informal bagi wisatawan.



Gambar 3. Kios-kios yang terdapat di tempat wisata Air Terjun Sipiso-piso

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomi secara langsung, terutama pada periode kunjungan tinggi, "Penjualan cukup baik, khususnya pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ketika banyak wisatawan datang dan membeli produk." (Wawancara dengan pelaku UMKM). Ketersediaan fasilitas kios yang disediakan pemerintah juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas usaha skala kecil, "Kios-kios di sini disewakan dan disediakan oleh pemerintah." (Wawancara dengan pelaku UMKM).



Gambar 4. Produk UMKM Minyak Pijat asli Karo

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Namun demikian, pengelolaan aktivitas ekonomi tersebut masih bersifat individual dan belum terorganisasi secara kolektif dalam sistem pemberdayaan masyarakat yang terstruktur. Dalam aspek pemberdayaan, beberapa informan menyebutkan bahwa program pelatihan telah dilaksanakan secara berkala, "Pelatihan UMKM diadakan secara rutin, sekitar enam bulan sekali, misalnya pelatihan memasak yang diselenggarakan oleh pemerintah." (Wawancara dengan pelaku UMKM).

Meskipun demikian, efektivitas program tersebut dinilai masih terbatas karena belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang peserta, "Menurut saya, pelatihan seharusnya disesuaikan dengan latar belakang UMKM." (Wawancara dengan pelaku UMKM).

UMKM). Selain itu, tidak adanya pendampingan lanjutan mengurangi keberlanjutan program pemberdayaan dan melemahkan motivasi masyarakat untuk mengembangkan kapasitas mereka lebih lanjut.

Partisipasi dalam pengelolaan pariwisata juga belum terdistribusi secara merata. Kelompok tertentu, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat masih terbatas pada partisipasi ekonomi dasar dan belum berkembang menuju penguatan kapasitas, pengorganisasian kolektif, maupun kemandirian masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kebutuhan yang kuat dari masyarakat lokal maupun wisatawan terhadap peningkatan infrastruktur pendukung dan fasilitas wisata. Aksesibilitas menuju air terjun masih menjadi persoalan utama, terutama karena jarak tempuh yang cukup jauh dan tantangan fisik untuk mencapai lokasi wisata, "Jarak untuk mencapai lokasi wisata cukup jauh." (Wawancara dengan wisatawan). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa informan mengusulkan pembangunan infrastruktur tambahan, "Seharusnya dibangun lift untuk akses menuju area air terjun." (Wawancara dengan pelaku UMKM).

Permasalahan terkait biaya juga menjadi perhatian, khususnya mengenai adanya persepsi biaya ganda, "Kami merasa terbebani dengan biaya ganda karena harus membayar parkir dan tiket masuk sekaligus." (Wawancara dengan wisatawan). Dari sisi fasilitas, ditemukan berbagai keterbatasan, seperti kurangnya penerangan, tidak tersedianya penginapan, dan minimnya fasilitas pendukung bagi wisatawan, "Penerangan masih kurang, hanya menyala dari pukul 18.00 sampai 21.00..., serta belum tersedia fasilitas penginapan." (Wawancara dengan wisatawan).



Gambar 5. Gazebo atau salah satu fasilitas di wisata Air Terjun Sipiso-piso

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Meskipun demikian, beberapa perbaikan telah terlihat, khususnya pada fasilitas dasar, "Renovasi toilet sudah cukup baik..., dan terdapat petugas kebersihan di lokasi." (Wawancara dengan wisatawan). Masyarakat lokal juga menekankan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pembangunan infrastruktur, "Masyarakat ingin dilibatkan dalam pembangunan agar muncul rasa memiliki." (Wawancara dengan anggota masyarakat). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan kurang memadainya fasilitas pendukung masih menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi Air Terjun Sipiso-piso sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan Air Terjun Sipiso-piso belum sepenuhnya terwujud. Ketiadaan koordinasi yang terstruktur, keterbatasan komunikasi, serta masih dominannya peran pemerintah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama tata kelola kolaboratif, seperti partisipasi inklusif, dialog, dan pengambilan keputusan bersama, belum diimplementasikan secara optimal. Berbeda dengan penelitian Mulyani dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Magelang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama yang didukung oleh kepercayaan, pemberdayaan, dan pemahaman bersama. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan finansial dan keterampilan menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, sehingga seluruh pihak dapat memperoleh manfaat dari pengembangan ekowisata (Chan dkk., 2021; Musleh dkk., 2023; Thomas, 2013). Mengacu pada kerangka collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) kolaborasi yang efektif memerlukan dialog tatap muka, mekanisme pembangunan kepercayaan, dan interaksi yang terinstitusionalisasi antar pemangku kepentingan. Sejalan dengan itu, Emerson dkk. (2012) menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi bergantung pada keterlibatan yang berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas kolektif. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan belum hadirnya elemen-elemen penting tersebut dalam konteks pengelolaan Air Terjun Sipiso-piso. Tidak adanya forum dialog yang rutin serta lemahnya proses pembangunan kepercayaan telah membatasi kapasitas kolaboratif dan memperkuat struktur tata kelola yang bersifat top-down.

Selain itu, lemahnya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang terfragmentasi antar pemangku kepentingan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif. Akibatnya, pengelolaan pariwisata masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkelanjutan, seperti infrastruktur yang belum memadai, pengelolaan sanitasi yang kurang optimal, serta aktivitas pariwisata yang belum tersusun secara sistematis dan profesional. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam konteks tersebut masih bersifat prosedural dibandingkan substantif, karena keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan strategis masih sangat terbatas.

Partisipasi masyarakat secara luas diakui sebagai komponen fundamental dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dalam proses perencanaan dan pengelolaan (Din et al., 2025). Partisipasi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, forum masyarakat, dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan (Salampessy et al., 2024). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di kawasan Air Terjun Sipiso-piso masih terbatas pada aktivitas ekonomi dan belum meluas pada aspek tata kelola maupun proses pengambilan keputusan. Masyarakat lokal pada umumnya terlibat dalam kegiatan berdagang, mengelola kios, mengatur area parkir, serta menyediakan berbagai layanan informal. Meskipun aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomi secara langsung, pengelolaannya masih bersifat individual dan belum terorganisasi secara kolektif dalam suatu sistem pemberdayaan yang terstruktur.

Kondisi ini mendukung pandangan Friedmann (1992) bahwa pemberdayaan tidak seharusnya terbatas pada partisipasi ekonomi semata, tetapi juga harus mencakup penguatan kapasitas, kemandirian, serta kontrol terhadap sumber daya. Keterbatasan pelatihan, minimnya pendampingan berkelanjutan, dan kurangnya dukungan kelembagaan yang

ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di kawasan Sipiso-piso belum mencapai tahap tersebut. Selain itu, ketimpangan partisipasi juga masih menjadi persoalan penting karena perempuan dan kelompok rentan belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata. Keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya kemampuan manajemen usaha, serta kurangnya inovasi produk semakin menghambat pengembangan usaha pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam sektor pariwisata sering kali hanya terbatas pada peran operasional dan belum menyentuh keterlibatan strategis (Darumurti dkk., 2022; Sitanggang & Sugiarti, 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi saja tidak cukup tanpa adanya dukungan struktural, mekanisme kelembagaan, dan fasilitasi yang berkelanjutan. Sebaliknya, penelitian Din dkk. (2025) menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang terstruktur, seperti pelatihan UMKM, pendampingan pengelolaan homestay, dan penguatan kapasitas pemasaran, mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus mendukung pengembangan ekonomi lokal. Partisipasi aktif masyarakat lokal juga dapat meningkatkan manfaat ekonomi, keberlanjutan jangka panjang, dan pelestarian lingkungan (Reindrawati, 2023; Yuwono dkk., 2020). Selain itu, keterlibatan masyarakat menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas lokal (Lintong dkk., 2025; Strippoli dkk., 2024). Lebih lanjut, masyarakat lokal memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang berkontribusi terhadap pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan tata kelola destinasi wisata (Chan dkk., 2021).

Sementara Darumurti dkk. (2022) menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui mekanisme yang terinstitusionalisasi, seperti *Focus Group Discussion* (FGD) rutin, identifikasi kebutuhan berbasis *bottom-up*, pendampingan berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor swasta, serta integrasi program pemberdayaan ke dalam kerangka kebijakan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa FGD berfungsi sebagai ruang bagi pemerintah desa dan pihak swasta untuk berperan sebagai fasilitator, menciptakan lingkungan yang mendukung, serta memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara aktif. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal di kawasan Air Terjun Sipiso-piso masih berada pada tahap partisipasi ekonomi dasar dan belum berkembang menuju penguatan kapasitas serta kemandirian masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan ekowisata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di kawasan Air Terjun Sipiso-piso. Akan tetapi, infrastruktur tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai kebutuhan fisik, melainkan sebagai bagian integral dari proses tata kelola. Keterbatasan aksesibilitas, kurang memadainya fasilitas, dan belum tersedianya infrastruktur yang inklusif menyebabkan menurunnya kenyamanan pengunjung serta membatasi pengalaman wisata secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Laysen dan Effendy (2024), akses menuju air terjun memerlukan usaha yang cukup besar akibat kondisi jalan yang menantang, sehingga membatasi mobilitas wisatawan dan mengurangi pemanfaatan potensi wisata, khususnya di area bawah air terjun.

Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung seperti area tempat duduk, gazebo, dan ruang ramah keluarga turut memengaruhi durasi kunjungan wisatawan dan secara tidak langsung membatasi peluang ekonomi masyarakat lokal. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas ramah anak dan area istirahat menjadi strategi penting untuk menarik segmen wisatawan yang lebih luas, terutama keluarga. Dari perspektif keberlanjutan, pembangunan infrastruktur juga harus

selaras dengan prinsip-prinsip ekowisata melalui penggunaan material ramah lingkungan dan integrasi yang harmonis dengan pemandangan alam. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis sekaligus meningkatkan kualitas destinasi wisata.

Lebih penting lagi, temuan penelitian menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola kolaboratif. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur dapat menumbuhkan rasa memiliki, memperkuat kapasitas lokal, serta menciptakan peluang ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan pandangan Anggoro (2006), yang menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya mendorong partisipasi, tetapi juga mampu mentransformasi perspektif dan peran masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata berkelanjutan memerlukan integrasi antara tata kelola kolaboratif dan pemberdayaan masyarakat. Lemahnya kolaborasi akan membatasi efektivitas pemberdayaan masyarakat, sementara rendahnya tingkat pemberdayaan juga akan menurunkan kualitas kolaborasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif, dan terinstitusionalisasi untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan Air Terjun Sipiso-piso.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan wisata Air Terjun Sipiso-piso di Kabupaten Karo telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pelaku usaha, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan. Hal tersebut ditandai dengan koordinasi yang masih bersifat parsial, komunikasi antar aktor yang belum optimal, serta dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, masyarakat lokal telah memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata melalui berbagai usaha dan layanan informal. Namun, pemberdayaan tersebut masih berada pada tahap partisipasi ekonomi dasar dan belum didukung secara optimal melalui penguatan kapasitas, pendampingan, maupun akses terhadap sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap adanya kebutuhan nyata terhadap peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti pembangunan jembatan menuju area bawah Air Terjun Sipiso-piso, penyediaan area bermain anak, tempat duduk yang memadai, serta gazebo sebagai sarana berteduh. Fasilitas-fasilitas tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan wisatawan sekaligus memperkuat peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Oleh karena itu, pengelolaan ekowisata berkelanjutan di kawasan Air Terjun Sipiso-piso memerlukan penguatan collaborative governance yang inklusif, pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan kemandirian, serta kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, Y., Neolaka, M. N. B. C., Lino, M. M., & Djaha, S. M. A. (2025). Sustainable Collaborative Governance Liman Beach Nature Tourism, South Semau District, Kupang Regency. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 6(5), 1048–1056. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v6i5.1515>
- Anggoro, Y. A. (2006). Kolaborasi Pemerintah, Polisi dan Masyarakat: Pengalaman COP Malioboro. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 10(2), 115–131.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical Research on the Governance of Tourism and Sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah. *Sustainability*, 13(23), 13302. <https://doi.org/10.3390/su132313302>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darumurti, A., Eko Atmojo, M., & Maghribi, W. O. (2022). Empowering Society by Collaborative Governance. Dalam *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)* (hlm. 699–719). Atlantis Press SARL. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7\\_57](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_57)
- Din, M., Nto, P., Sunu Astuti, R., & Dwimawanti, I. H. (2025). Stakeholder Collaboration in the Development of Sustainable Marine Tourism in Wakatobi Regency, Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, IX(XIV), 638–651. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.914MG0050>
- Dowling, R. K. (2007). Book Review: Critical Issues in Ecotourism: Understanding a Complex Tourism Phenomenon, Edited by James Higham. *International Journal of Tourism Policy*, 1(3), 286. <https://doi.org/10.1504/IJTP.2007.017044>
- Edyanto, Asmadianto, & Iriawan, H. (2026). Collaborative Governance in the Development of Ecotourism Based on Local Wisdom in Biak Numfor Regency. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 10(1), 243–253.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/muro11>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell.
- Hamka, Koesponco, E., Anita, Cahyaningrum, S., & Yusuf, M. (2022). Stakeholder Collaboration in Developing Sustainable Ecotourism in Badung. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.11020>

- Irmawati, I., & Hasnawati, H. (2024). Community-Based Ecotourism Strategy for Local Economic Empowerment. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 395–404. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2359>
- Laysen, M., & Effendy, S. (2024). The Influence of Destination Image on Satisfaction and Impact on Tourist Loyalty (study on Sipiso-Piso Waterfall Tourists). *Jurnal Ekonomi*, 13(01), 1123–1131.
- Lintong, E. H., Pangkey, D. A. P. J., & Runtuwene, H. C. M. (2025). Circular Economy-Based Waste Management in Tomohon City: Toward a Green Economy Through Innovative and Participatory Approaches. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 9(4), 1503–1514.
- Malik, M. (2018). Towards an Ecotourism Policy: Global Practices and the Lessons for Jammu and Kashmir. *International Journal of Global Science Research*, 5(2). <https://doi.org/10.26540/ijgsr.v5.i2.2018.109>
- Merina, B., & Muhaimin, M. (2023). Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v3i1.1507>
- Merina, B., Sholahuddin, A., & Sukowati, P. (2023). The Empowerment of Indigenous Papuan Women Through Home-Based Industries: A Case Study in Papua, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 38. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0124>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis* (4th ed.). Sage Publications.
- Muda, F. (2025). Community Participation in Indonesian Sustainable Tourism: A Systematic Review of Models, Impacts, and Gaps. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(8), 125–139. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.462>
- Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021). Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 319–334. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.958>
- Musleh, Moh., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental: Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism, Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Purwoko, A., Patana, P., Alikodra, H. S., Kuswanda, W., Gandaseca, S., Suntornvongsagul, K., Ahmad, A. G., & Harita, S. L. (2025). Development of nature-based tourism based on forest ecosystem potential in the Sipiso-Piso Tongging Geosite Area, Toba Global Geopark, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1573(1), 012024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1573/1/012024>
- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of Community Participation in Tourism Planning in Developing Countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2164240. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2164240>
- Salampessy, M., Nugraha, A. R., Sjoraida, D. F., Wijoyo, H., Arifin, A. H., Rasyid, Santosa, T. A., Kurniawan, A., & Wulandari, A. S. R. (2024). Citizen Participation in Public Administration: A Review Literature. *E-science Humanity*, 5(2), 176–183.
- Saufi, A., O'Brien, D., & Wilkins, H. (2014). Inhibitors to Host Community Participation in Sustainable Tourism Development in Developing Countries. *Journal of Sustainable Tourism*, 22(5), 801–820. <https://doi.org/10.1080/09669582.2013.861468>

- Sitanggang, L. S., & Sugiarti, D. P. (2020). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Air Terjun Sipisopiso Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(2), 238–245.
- Situmorang, S. S., Situmorang, M., Lumban Gaol, L. C., Pakpahan, E. N., & Simangunsong, L. E. (2025). Medan as a Multicultural City: Ethnic and Cultural Dynamics in the Late 19th Century. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 6(1), 46–53. <https://doi.org/10.34007/warisan.v6i1.2708>
- Strippoli, R., Gallucci, T., & Ingrao, C. (2024). Circular Economy and Sustainable Development in the Tourism Sector – An Overview of the Truly-Effective Strategies and Related Benefits. *Heliyon*, 10(17), e36801. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36801>
- Thomas, Y. (2013). Assessing Community Participation in Selected Ecotourism Projects in the Brong-Ahafo Region, Ghana. *Journal of Ecology and The Natural Environment*, 5(7), 133–143. <https://doi.org/10.5897/JENE2012.0351>
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.
- Yuwono, E., Maulany, R. I., & Barkey, R. A. (2020). Site Suitability Evaluation for Ecotourism Development: A Case Study in Bulue Village, Soppeng District, Indonesia. *Journal of Sustainability Science and Management*, 16(1), 129–140. <https://doi.org/10.46754/jssm.2021.01.012>